

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Depok merupakan salah satu kota yang cukup padat dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data BPS Kota Depok, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Kota Depok terus meningkat, pada tahun 2011 jumlah penduduk adalah 1.813.613 jiwa dan sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Depok meningkat mencapai 2.056.335 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada, ini juga menjadi salah satu hal yang memicu adanya berbagai permasalahan lainnya bagi Kota Depok. Salah satunya adalah tingkat ketimpangan pembangunan dan kemiskinan yang ada di kota Depok.

Depok juga menjadi salah satu sorotan didalam beberapa media pemberitaan yang mengangkat berbagai macam permasalahan yang terjadi di Depok. Seperti yang tertulis dalam Kompas.com, yang membahas mengenai berbagai macam permasalahan Kota Depok mulai dari ketimpangan pembangunan dan tingkat pengangguran. Pembangunan yang cenderung margonda-sentris dibahas dalam artikel ini, dimana pembangunan hanya pada daerah tertentu seperti wilayah margonda. Dan pada artikel ini juga membahas mengenai tingkat pengangguran tinggi dan tingkat APBD yang rendah di Kota Depok. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran di Kota Depok tahun 2015 sebanyak 7.48% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 9.87%. Sementara presentase penduduk miskin pada tahun 2020 mencapai 2.45% yang sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 2.34% (depokkota.BPS.go.id, 2022).

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kota Depok dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kota Depok. Terlepas dari berbagai permasalahan yang

ada, pemerintah kota Depok juga berhasil mendapatkan penghargaan pada hal lainnya. Kota Depok berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan dari tingkat nasional hingga daerah provinsi. Seperti penghargaan Adipura pada tahun 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penghargaan Kota Layak Anak kategori madya, penghargaan kota peduli HAM tahun 2016, Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden RI yaitu Anugerah Parasma dan Satyalencana atau kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan berbagai penghargaan lainnya.

Sejak tahun 2015-2020, Kota Depok dipimpin oleh Mohammad Idris Abdul Shomad sebagai walikota Kota Depok yang didampingi oleh Pradi Supriatna sebagai wakil walikota. Dan pada Pilkada Serentak tahun 2020, Mohammad Idris juga berhasil memenangkan Pilkada Kota Depok dan menjabat sebagai walikota pada periode kedua dengan didampingi Imam Budi Hartono selaku wakil walikota. Pada kepemimpinan Mohammad Idris periode pertama, Depok menjadi salah satu kota yang banyak menjadi sorotan. Selain permasalahan kota yang sebelumnya di jelaskan, Kepemimpinannya juga menjadi perbincangan beberapa tokoh dan masyarakat khususnya pada kebijakan yang coba dibuat oleh sang walikota. Menurut CNN Indonesia (2020), salah satu kebijakan yang cukup kontroversi adalah dengan adanya pemutaran lagu dilampu merah simpang kota yang diciptakan oleh bapak Idris sendiri. Pemutaran lagu ini sempat menuai kontroversi dengan berbagai opini dari masyarakat yang dianggap aneh dan lucu dan tidak menjadi solutif.

Kemudian hal yang menuai kontroversi lainnya adalah kebijakan Ladies Parking yang bermaksud untuk memisahkan lokasi parkir antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi perempuan. Kebijakan ini sudah diterapkan di wilayah kantor pemerintah Kota Depok dan RSUD Depok (Tempo.co, 2019). Namun beberapa masyarakat melihat ini sebagai hal yang jenaka, hingga viral di media sosial tahun 2017. Kebijakan yang juga

menuai pro dan kontra adalah terkait Raperda Kota Religius yang diusulkan pada tahun 2019. Namun draft Raperda ini ditolak oleh DPRD karena dianggap diskriminatif dan berpotensi akan menuai konflik umat beragama (Depok24jam.com,2020). Salah satu poin yang dianggap akan memunculkan konflik adalah mengenai etika pakaian dan akan dikenakan sanksi apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan.

Mengenai berbagai kebijakan yang kontroversial yang dibuat oleh Mohammad Idris, kepemimpinannya menjadi banyak sorotan para tokoh dan masyarakat. Pada artikel yang dimuat JabarEkspres.com (2021), menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan dari sosok Mohammad Idris sebagai walikota depok cenderung feodalistik atau kekuasaan cenderung dikuasai oleh satu orang. Pendapat ini dikemukakan oleh Mohammad Saihu selaku Pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Jabar. Saihu menganggap bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok belum bekerja dengan maksimal dan menarik kesimpulan bahwa persoalan ini berakar pada gaya kepemimpinan dari walikota Depok.

Kemudian pada artikel WartaDepok.com, membahas mengenai kepemimpinan Walikota Depok Mohammad Idris yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pendapat ini disampaikan oleh pakar Psikologi Politik UI Prof. Hamdi Muluk, yang mengatakan bahwa walikota Depok sibuk mengurus ideologi sementara yang diperlukan adalah bentuk layanan publik yang konkrit seperti perbaikan jalan, kemacetan, perbaikan selokan, dll. Dan menyebutkan bahwa APBD Kota Depok selalu mengalami sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program lain. Seperti pada tahun 2020 sisa lebih penggunaan anggaran pada APBD Kota Depok sebanyak 615,74 M (dpjk.kemenkeu.go.id). Prof. Hamdi juga mengatakan bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan APBD agar maksimal juga dapat meminta pendapat para ahli dan akademisi untuk membuat program-program pemerintah.

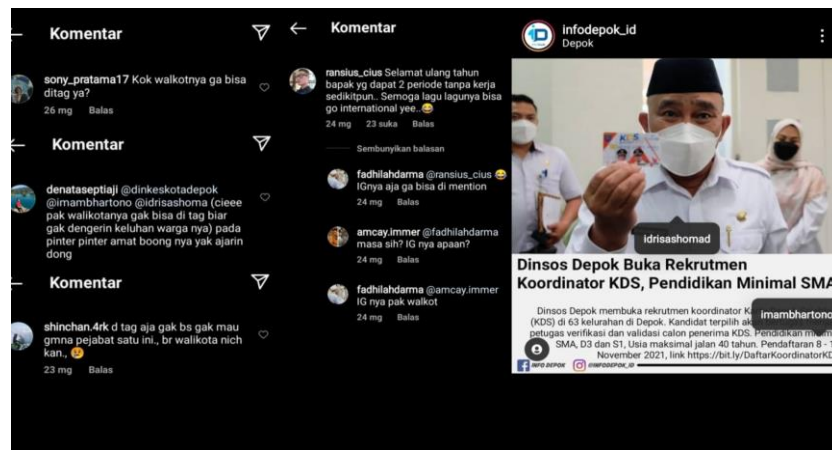
Pendapat lain juga disampaikan oleh Babai Suhaimi Anggota DPRD Kota Depok melalui artikel wartajurnalis.com (2020), yang mengatakan bahwa kepemimpinan Mohammad Idris sebagai walikota Depok dianggap gagal. Kegagalan tersebut menyangkut permasalahan dari tata kota, dunia pendidikan, masalah akses jalan, kenakalan remaja dll. Termasuk pada permasalahan pembangunan Kota Depok menjadi kota religius. Permasalahan pendidikan yang menyangkut pembangunan gedung sekolah seperti gedung MTS Cimanggis, hingga permasalahan jalan seperti trotoar dan drainase yang membuat beberapa jalan menjadi langganan banjir.

Selain berbagai pendapat dari para tokoh akademisi mengenai kepemimpinan Idris, masyarakat juga menyampaikan pendapatnya mengenai sosok Walikota Depok ini. Masyarakat banyak menyampaikan mengenai apa permasalahan Kota Depok dan kepemimpinan sosok Idris melalui media sosial. Dimana media sosial menjadi salah satu wadah dalam menyampaikan pendapat mengenai apa yang sedang terjadi dengan menghubungkan banyak orang kedalam satu jejaring, termasuk pada hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Banyak kepala daerah yang melakukan interaksi dengan masyarakatnya melalui media sosial untuk mengetahui apa yang terjadi dan menjadi permasalahan diwilayah yang dipimpinnya.

Namun sedikit berbeda dengan Mohammad Idris, media sosial instagram miliknya justru menjadi privat sehingga masyarakat menjadi sedikit kesulitan dalam melakukan interaksi dengan walikotanya. Seperti pada salah satu media sosial yang banyak diikuti oleh warga Depok yakni instagram @infodepok yang membahas mengenai hal-hal yang terjadi di Kota Depok ini menjadi wadah informasi terkini. Namun masyarakat banyak yang menyayangkan bahwa dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, instagram milik walikota Idris tidak dapat di tag atau menyebut akun dari Mohammad Idris.

Adanya keterbatasan interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin seperti ini juga mengindikasikan bahwa adanya sebuah kepemimpinan yang cenderung tertutup. Hal ini terjadi sejak periode pertamanya sebagai walikota, sehingga masyarakat sulit berkomunikasi melalui media sosial. Pada awal periode keduanya juga masih membatasi orang lain untuk menyebut Instagram sang walikota. Dan pada sejak bulan November tahun 2021, akun Instagram Idris sudah mulai bisa disebutkan dalam sebuah kolom komentar.

Gambar 1 Instagram @infodepok_id



Sumber: Tangkapan Layar Instagram @infodepok_id

Pada akhir tahun 2020 telah dilaksanakan pilkada serentak di sebagian besar daerah Indonesia. Yang dimana pada waktu yang bersamaan dunia juga sedang dihadapkan oleh permasalahan pandemi. Pada pilkada 2020 Kota Depok, Mohammad Idris berhasil mendapatkan perolehan suara tertinggi dan berhasil menjabat kembali sebagai walikota Depok dengan didampingi oleh Imam Budi Hartono. Pada awal 2021 Mohammad Idris- Imam Budi Hartono resmi dilantik sebagai walikota dan walikota Depok tahun 2021-2026, dan ini merupakan periode kedua kepemimpinan Mohammad Idris sebagai walikota.

Sri Mulyani, 2022

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN MOHAMMAD IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Pada periode kedua kepemimpinan Mohammad Idris sebagai walikota langsung dihadapkan mengenai berbagai macam permasalahan penanganan pandemi Covid-19. Yang dimana pandemi ini bukan menjadi permasalahan suatu wilayah saja, namun juga sebagai pandemi global (Velavan & Meyer, 2020). Pandemi Covid-19 ini membuat kekhawatiran pada setiap warga negara dan tentunya pandemi ini memunculkan problematika lainnya selain pada kesehatan. Para pemimpin negara maupun wilayah terus berupaya melakukan upaya pencegahan hingga pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi.

Di negara asal penyebaran virus Covid-19 ini yakni di Wuhan, China telah dilakukan *lockdown* sehingga kasus terkonfirmasi dapat terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah menerapkan *lockdown* (Laau et al., 2020). Penguncian aktivitas atau *lockdown* ini dilakukan bukan hanya pada pembatasan kegiatan masyarakat, namun juga tidak melakukan perjalanan keluar dan masuknya seseorang di suatu negara.

Namun tidak semua negara dapat melakukan *lockdown* karena berbagai macam pertimbangan dan kemampuan negaranya. Seperti negara Indonesia yang memilih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan beberapa pertimbangan akan beberapa aktifitas dimasyarakat Indonesia yang tidak dapat dilakukan pemberhentian begitu saja, akhirnya pemerintah Indonesia memilih PSBB sebagai kebijakan yang lebih baik diterapkan di Indonesia (Nasruddin & Islamul Haq, 2020). Dalam merespon kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan PSBB sejak tanggal 10 April 2020 hingga PPKM di pertengahan tahun 2021 (Ristiyawati, 2020).

Selama pelaksanaan kebijakan pengendalian Covid-19 di Indonesia, pemerintah berusaha untuk membuat kondisi stabil dimasyarakat. Banyak masyarakat yang terdampak dari kebijakan pengendalian Covid-19, dan pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang

terdampak pandemi. Bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah ini berupa paket sembako dan bantuan sosial tunai (Kementrian Sosial RI, 2020). Namun pada kenyataannya terdapat masalah baru yaitu tindak korupsi bantuan sosial yang dilakukan menteri sosial Juliari Batubara. Hingga dengan adanya kasus ini, presiden Jokowi langsung melakukan pergantian menteri sosial dengan menunjuk Tri Rismaharini sebagai menteri baru.

Kepemimpinan presiden menjadi contoh kepemimpinan tingkat nasional, khususnya pada penanganan pandemi Covid-19. Dan dengan adanya sistem desentralisasi pada sistem pemerintahan Indonesia, memunculkan kepemimpinan lokal yang dilakukan oleh para kepala daerah, dan artinya kepala daerah juga bisa menjadi pemimpin dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya. Kepemimpinan adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan sebuah pertanggungjawaban, kesuksesan dan kegagalan sebuah organisasi (Madina, 2015).

Kepemimpinan sering kali dipahami sebagai kemampuan untuk mendominasi orang lain sehingga dapat membuat orang lain mengikuti perintah pemimpin. Menurut Ralph M. Stogdill, kepemimpinan adalah proses untuk mendominasi kegiatan sekelompok orang yang terorganisir dalam berupaya mencapai sebuah tujuan (Sagala, 2018). Sementara menurut Robert Dubin dalam buku Kepemimpinan dan Motivasi, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan (Dina, 2013).

Sebagai kepala daerah, memiliki tanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang ada di daerahnya. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam proses kepemimpinannya. Salah satu kepala daerah yang banyak dikaji yakni Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Dalam kepemimpinannya, Kota Semarang berhasil mendapatkan banyak penghargaan dan banyak mengeluarkan inovasi baru yang menjadikan pemerintah Kota Semarang menjadi lebih efektif (Ode et al., 2020).

Sri Mulyani, 2022

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN MOHAMMAD IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Gaya kepemimpinan Hendrar Prihadi merupakan salah satu contoh gaya kepemimpinan transformasional yang mampu membawa perubahan dengan inovasi baru. Di tengah pandemi Covid-19 ini pemerintahan kota Semarang juga memiliki inovasi dalam penanganan pandemi dan mendapat penghargaan atas inovasi penanganan pandemi dari berbagai pihak.

Sebagai kota ditemukannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia, Kota Depok menjadi menarik untuk dikaji dalam bagaimana penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut media Indonesia.go.id (2020), Kasus pertama Covid-19 dialami oleh dua warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Depok, keduanya merupakan ibu dan anak yang terpapar ketika usai berinteraksi dengan warga negara asing asal Jepang. Dengan ditemukannya kasus pertama ini, pemerintah berusaha untuk menangani penyebaran virus, namun kasus penyebaran kian bertambah setelah kasus pertama tersebut.

Sosok Mohammad Idris sebagai walikota Depok tentu menjadi sosok penting dalam pemerintahan daerah, terutama dalam penanganan kasus pandemi Covid-19 di Kota Depok. Walikota sebagai pemimpin daerah berkewajiban dalam melakukan pengendalian pandemi dengan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Kebijakan penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kota Depok sudah dilakukan mulai dari kebijakan Pembatasan sosial/pembatasan kegiatan, penyediaan fasilitas kesehatan, membuat kampung siaga Covid-19, hingga program bantuan sosial bagi masyarakat.

Namun beberapa kebijakan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Depok ini tidak berjalan dengan baik dan efektif. Menurut CNN Indonesia (2020), terdapat kasus pemotongan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh beberapa oknum RT dan RW. Dan adanya kasus penggelapan dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kota Depok. Dalam artikel Viva.com (2021) juga menyebutkan bahwa adanya pemotongan insentif nakes non-PNS di Puskesmas Cilodong Depok. Pemotongan ini dilakukan sebesar 30% yang

ditujukan untuk melakukan pembagian honor kepada nakes lainnya, namun kebijakan tersebut tidak mendapatkan transparansi terkait distribusi dana tersebut. Dengan berbagai isu dan permasalahan yang berkembang, pemerintah daerah tentu melakukan respon dalam menyikapi hal tersebut yang tentunya sesuai dengan arah dari seorang pemimpin.

Pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga memiliki peran yang cukup penting sebagai pengarah tujuan. Kepemimpinan seseorang akan menentukan hasil yang akan didapatkan dan berperan penting dalam proses pencapaian tujuan. Proses kepemimpinan ini dapat dilihat dari personal seorang pemimpin, dimana setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dari berbagai aspek seperti ciri sifat maupun sikap dalam bertindak. Maka dari itu persoalan kepemimpinan pada sebuah lembaga pemerintahan akan menjadi penentu kualitas dan arah dari sebuah lembaga atau organisasi.

Penelitian mengenai kepemimpinan seorang kepala daerah ini bukanlah hal baru dalam studi politik di Indonesia. Dalam menyusun penelitian ini, berpacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan yang sama mengenai kepemimpinan. Penelitian karya Ridho Imawan Hanaf dkk pada tahun 2020, berjudul *KEPEMIMPINAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19: RESPONS, KEBIJAKAN, DAN PANGGUNG ELEKTORAL* JURNAL PENELITIAN POLITIK. Penelitian ini membahas mengenai beberapa kepemimpinan sosok kepala daerah dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19. Relevansi penelitian Hanafi et al., (2020) dengan penelitian ini yakni teori dan objek penelitian yang sama yaitu kepemimpinan dan penanganan pandemi. Membahas mengenai langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespon dan membuat kebijakan.

Kemudian penelitian Retnowati WD Tuti & Sa'diyah El (2020), berjudul *KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI SEBAGAI MODEL BIROKRASI EFEKTIF*, Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan

Sri Mulyani, 2022

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN MOHAMMAD IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pogram Studi Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Komunikasi Bisnis Vol. 4 No. 1 Juni 2020 pp. 73-82. Penelitian ini membahas mengenai kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan menyebutkan gaya kepemimpinan dan bagaimana kepemimpinan tersebut bekerja.

Penelitian Tuti & Adawiyah (2020) menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan dapat bekerja dalam sebuah organisasi. Kemudian menjelaskan tiga tipe gaya kepemimpinan dari teori Bass (1985) yakni, kepemimpinan Transaksional, Kepemimpinan Transformasional, kepemimpinan Laissez Faire. Relevansi penelitian Tuti & Adawiyah (2020) dengan penelitian ini adalah pada pembahasan yang digunakan, yaitu kepemimpinan pada birokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada penelitian kepemimpinan yakni kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dan kombinasi antara situasi yang baik dan gaya kepemimpinan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Tuti & Adawiyah (2020) dimana fokus analisis terdapat pada kepemimpinan di tengah situasi krisis pandemi Covid-19.

Penelitian selanjutnya yang juga membahas gaya kepemimpinan yakni berjudul ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURAKARTA FX RUDYATMO, Jurnal Politic and Government Studies Universitas Diponegoro Vol. 4, No. 2 oleh U. N. Diyah, R. Martini, and N. R. Herawati tahun 2015. Jurnal ini membahas mengenai kepemimpinan FX Hadi Rudyatomo selama menjabat sebagai walikota Surakarta selama dua periode, yang selama kepemimpinannya membawa kota surakarta menjadi lebih maju. Jurnal ini memberikan sebuah contoh atau gambaran mengenai tipe atau gaya kepemimpinan demokratis.

Penelitian Diyah (2015) ini membahas kemajuan dari pemerintahan kota surakarta selama kepemimpinan Hadi, dan menerangkan bahwa kesuksesan kepemimpinan ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Hadi Rudyatmo. Selama kepemimpinannya sebagai walikota surakatra, Hadi dinominasikan menjadi walikota terbaik dunia dalam majalah World Best Mayor. Dalam jurnal ini ditekankan bahwa, kepemimpinan sukses seperti surakarta ini

Sri Mulyani, 2022

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN MOHAMMAD IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pogram Studi Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

tercipta karena adanya hubungan harmonis dan seimbang antara pemimpin dan bawahannya. Relevansi jurnal U. N. Diyah et.al. (2015) dengan penelitian ini adalah kesamaan teori dan objek yang diteliti, dan memberikan referensi terkait dengan acuan penelitian.

Kemudian dalam penelitian lain membahas mengenai salah satu contoh gaya kepemimpinan transformasional atau transformatif. Seperti penelitian yang berjudul *KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM MEMBANGUN BUDAYA KEWARGAAN: STUDI KEPEMIMPINAN RIDWAN KAMIL DI KOTA BANDUNG*, Jurnal Integralistik Universitas Negeri Semarang Vol 28, No 1 oleh Puji Lestari tahun 2017. Jurnal ini membahas mengenai gaya kepemimpinan Ridwan Kamil di kota Bandung. Kepemimpinan politik Ridwan Kamil ini termasuk contoh dari gaya kepemimpinan Transformasional atau Transformatif. Penelitian ini menekankan bahwa kepemimpinan transformatif menjadi tipe ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Jurnal ini memberikan kontribusi terhadap gambaran mengenai gaya kepemimpinan transformatif dan memiliki relevansi pada kesamaan teori yang digunakan.

Namun pada beberapa kasus sulit ditentukan gaya kepemimpinan yang mendominasi pada seseorang, sehingga penelitian lainnya menghubungkan semua gaya kepemimpinan sesuai dengan kondisi yang sedang dijalani. Salah satu jurnal tersebut berjudul *GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA KOTA MAKASSAR PERIODE 2014-2019*, Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship (HJABE) Vol. 1 No. 2 oleh Ilham Eka Putra et.al tahun 2018. Jurnal ini membahas mengenai gaya kepemimpinan walikota makassar Danny Pomanto. Selama kepemimpinan Danny Pomanto ini, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, mencoba menganalisis tiga gaya kepemimpinan White & Lippit yakni Otokratis, Demokratis, dan Laissez Fair. Dalam penelitian ini bukan

Sri Mulyani, 2022

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN MOHAMMAD IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pogram Studi Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

menjelaskan salah satu contoh kepemimpinan, melainkan lebih menekankan pada keseimbangan dalam penentuan suatu gaya kepemimpinan di pemerintahan daerah. Penelitian ini membahas mengenai kaitan antara gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai. Relevansi jurnal dengan penelitian ini adalah pada teori gaya kepemimpinan yang digunakan serta menjadi gambaran atas hubungan antara kepemimpinan dan kinerja pemerintahan. Dan mengetahui gaya kepemimpinan apa yang lebih bisa menjadikan kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif.

Jurnal berikutnya yang juga membahas mengenai kepemimpinan dan pandemi yakni berjudul THE FIVE LEADERSHIP STYLE IN TIME OF PANDEMIC COVID-19 THROUGHOUT INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AS COMPARED TO HUMANE LEADERSHIP, International Journal Of Sociology, Policy And Law (IJOSPL) Volume 01: No 01 oleh Leo AM Hutagalung, Agus Purwanto, Agustian Prasetya pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai lima gaya kepemimpinan yang digunakan untuk mencapai hasil kepuasan yang maksimal. Gaya atau metode kepemimpinan tersebut yaitu transaksional, transformasional, demokratis, birokratis, karismatik.

Penelitian Hutagalung et al., (2020) ini menjelaskan beberapa tipe kepemimpinan yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Kepemimpinan harus memiliki kemampuan untuk mengatasi atau menangani suatu masalah baru sehingga kepemimpinan harus dikuasai secara eksplisit. Seorang pemimpin juga harus menguasai metode memimpin untuk menginstruksikan bawahan agar bekerja secara maksimal walaupun dihadapkan oleh keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Seorang pemimpin harus bersifat terbuka, memiliki kemampuan untuk mendengar dan melihat apa yang menjadi kebutuhan.

Relevansi Penelitian Hutagalung et al., (2020) dengan penelitian ini adalah pembahasan serupa terkait dengan teori yang digunakan. Menggambarkan pola hubungan seorang pemimpin dengan bawahan nya dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mendorong motivasi bawahan. Dan pada

Sri Mulyani, 2022

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN MOHAMMAD IDRIS ABDUL SHOMAD SEBAGAI WALIKOTA DEPOK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pogram Studi Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kepemimpinan masa pandemi ini seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi terkait permasalahan pandemi.

Terakhir adalah penelitian yang berjudul *DECISIVE LEADERSHIP IS A NECESSITY IN THE COVID-19 RESPONSE*, Journal Elsevier Public Health Emergency Collection Vol.396 oleh Al Saidi, A., Nur, F. A., Al-Mandhari, A. S., El Rabbat, M., Hafeez, A., & Abubakar, A. Pada tahun 2020. Penelitian ini mengenai kepemimpinan yang tegas dalam penanganan pandemi adalah sebuah keharusan. Keberhasilan negara-negara didunia dalam upaya penanganan tanggap darurat Covid-19 tidak terlepas dari karakteristik kepemimpinan yang tegas.

Penelitian Saidi et al., (2020) membahas mengenai pemimpin yang baik akan memastikan koordinasi berjalan dengan baik, baik itu pada dimensi sosial ekonomi maupun kesehatan. Pembuatan satuan gugus tugas dapat menjadi solusi untuk memudahkan koordinasi dalam tanggap respon pandemi. Penelitian ini juga mengatakan bahwa sistem desentralisasi terkadang diidentifikasi sebagai masalah, jika tidak terjadi komunikasi yang buruk.

Kepemimpinan yang tegas sangat menghargai pentingnya komunikasi publik yang terpercaya. Membangun kepercayaan membutuhkan komunikasi yang jelas dan konsisten sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Karena keberpihakan politik dapat berdampak negatif pada preferensi kebijakan dalam respon penanganan pandemi. Relevansi penelitian Saidi et al., (2020) dalam penelitian ini adalah pada pembahasan terkait bagaimana kepemimpinan yang baik dalam upaya penanganan tanggap darurat pandemi Covid-19. Dan pembahasannya terkait respon yang sesuai dengan tanggap darurat pandemi.

Pada sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisis kepemimpinan pada aspek kepribadian dan pola hubungan yang tercipta antara atasan dan bawahan, namun sedikit mengabaikan pada aspek kepemimpinan pada situasi atau kondisi krisis. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi celah kosong

dari kajian-kajian mengenai kepala daerah dengan melihat aspek kepemimpinan seorang pemimpin dalam pendekatan situasi krisis seperti kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 yang terjadi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan Idris Abdul Somad sebagai walikota Depok dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian ini yakni “Bagaimana penerapan gaya kepemimpinan Mohammad Idris Abdul Shomad sebagai Walikota Depok dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan walikota Depok dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan yang berkaitan dengan jurusan ilmu politik khususnya mengenai kepemimpinan kepala daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai kepemimpinan walikota Depok dalam penanganan pandemi, serta

diharapkan berguna bagi pembaca sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara runtut mengikuti struktur yang telah ada dengan membagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan terkait dengan kepemimpinan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai teori dan konsep kepemimpinan, serta kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu terkait dengan proses penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi Idris Abdul Shomad, serta memaparkan temuan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gaya kepemimpinan walikota dalam penanganan pandemi di Kota Depok.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian, serta saran yang bisa menjadi alternatif mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.